Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)
Volume 9, Nomor 3, Mei-Juni 2026
e-ISSN: 2598-4934
p-ISSN: 2621-119X
DOI: https://doi.org/10.31539/gdstj996

KONFLIK DIGITAL, TRAUMA KOMUNITAS, DAN KEBIJAKAN PUBLIK: ANALISIS PROGRAM

Rulinawaty[1], Lukman Samboteng[2]
Politeknik STIA LAN Makasar[1,2]
rulinawaty@umj.ac.id[1]

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika konflik sosial di Manggarai serta menilai kesesuaian Program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian atau Kampung Redam sebagai respons kebijakan publik berbasis komunitas. Penelitian ini menggunakan metode *mixed-method policy analysis* dengan desain kualitatif-dominan. Data diperoleh dari survei warga, wawancara, notula monitoring, dan dokumen program. Analisis dilakukan melalui *framework analysis* untuk memetakan akar konflik berdasarkan *social-ecological model*, *conflict transformation*, *collaborative governance*, dan *policy instrument mix*, serta *realist evaluation* sederhana untuk membaca hubungan antara konteks, mekanisme kebijakan, dan hasil yang diharapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di Manggarai terbentuk melalui interaksi antara pengangguran, putus sekolah, kepadatan hunian, lemahnya pengawasan keluarga, solidaritas kelompok pemuda, provokasi eksternal, stigma wilayah, serta eskalasi konflik melalui media sosial. Setiap wilayah menunjukkan konfigurasi masalah yang berbeda. RW 02 relatif kondusif karena kuatnya koordinasi warga, sedangkan RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 012 menunjukkan variasi persoalan ekonomi, keluarga, keamanan, digital, dan psikososial. Kecenderungan yang paling dominan dalam hasil ini adalah munculnya transformasi konflik dari kekerasan fisik menuju konflik digital melalui siaran langsung dan monetisasi konten kekerasan. Simpulan, menunjukkan bahwa Kampung Redam perlu dirancang sebagai kebijakan adaptif berbasis konteks. Implikasinya, penanganan konflik membutuhkan kombinasi instrumen keamanan, pendidikan alternatif, pemulihan trauma, pemberdayaan ekonomi, literasi digital, perbaikan hunian, dan tata kelola kolaboratif lintas sektor.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Konflik Sosial Perkotaan, Tata Kelola Kolaboratif, Transformasi Konflik.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the dynamics of social conflict in Manggarai and assess the suitability of the Reconciliation and Peace Village Program, or Kampung Redam, as a community-based public policy response. This study employed a mixed-methods policy analysis with a predominantly qualitative design. Data were obtained from resident surveys, interviews, monitoring minutes, and program documents. The analysis was conducted using a framework analysis to map the roots of the conflict based on the social-ecological model, conflict transformation,

collaborative governance, and policy instrument mix, as well as a simple realist evaluation to understand the relationship between context, policy mechanisms, and expected outcomes. The results indicate that the conflict in Manggarai was formed through the interaction of unemployment, school dropouts, residential density, weak family supervision, youth group solidarity, external provocation, regional stigma, and conflict escalation through social media. Each region exhibited a different configuration of problems. RW 02 was relatively conducive due to strong community coordination, while RW 03, RW 04, RW 05, and RW 012 exhibited a variety of economic, family, security, digital, and psychosocial issues. The most dominant trend in these results is the emergence of a transformation of conflict from physical violence to digital conflict through live broadcasts and the monetization of violent content. The conclusion suggests that Kampung Redam needs to be designed as a context-based, adaptive policy. The implication is that conflict management requires a combination of security instruments, alternative education, trauma recovery, economic empowerment, digital literacy, housing improvements, and cross-sectoral collaborative governance.

Keywords: *Collaborative Governance, Conflict Transformation, Public Policy, Urban Social Conflict.*

PENDAHULUAN

Konflik sosial di wilayah perkotaan merupakan persoalan kebijakan publik yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai gangguan keamanan atau penyimpangan perilaku kelompok tertentu. Dalam konteks kota besar, konflik sering muncul dari pertemuan antara kepadatan hunian, tekanan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan, lemahnya pengawasan keluarga, dinamika kelompok pemuda, serta penggunaan media sosial yang mempercepat eskalasi konflik. Oleh karena itu, penanganan konflik sosial memerlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif, kolaboratif, dan transformatif. Kebijakan publik dalam konteks ini perlu dinilai bukan hanya dari kemampuannya menghentikan kekerasan sesaat, tetapi juga dari kapasitasnya membangun kepercayaan sosial, memperkuat kelembagaan komunitas, memulihkan trauma, dan mengatasi akar struktural konflik.

Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, merupakan salah satu wilayah perkotaan yang memiliki riwayat konflik sosial berulang, terutama dalam bentuk tawuran antarkelompok. Data survei Kampung Redam yang melibatkan 84 responden menunjukkan bahwa konflik di Manggarai dipersepsikan sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh provokasi antarkelompok, kesalahpahaman komunikasi, dendam lama, saling ejek, serta penggunaan media sosial sebagai ruang provokasi dan mobilisasi konflik. Survei tersebut juga menggambarkan bahwa konflik memiliki pola eskalasi bertahap dari interaksi digital menuju konfrontasi fisik, dengan media sosial berperan sebagai pemicu, penguat, dan percepatan konflik. Dengan demikian, konflik Manggarai tidak dapat direduksi sebagai tawuran spontan,

melainkan sebagai konflik sosial yang mengalami pengulangan pola melalui solidaritas kelompok, respons balasan, dan perluasan ruang konflik ke media digital.

Program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian atau Kampung Redam hadir sebagai respons kebijakan terhadap persoalan tersebut. Dalam evaluasi, Kampung Redam didefinisikan sebagai program rekonsiliasi dan perdamaian di wilayah pasca konflik yang mendorong ruang pemulihan hubungan untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan. Tujuannya mencakup pemulihan hubungan, penanganan trauma, pembangunan kepercayaan, penciptaan perdamaian berkelanjutan, serta pembentukan masyarakat yang berkeadilan. Secara normatif, rumusan ini menunjukkan bahwa Kampung Redam tidak hanya dirancang sebagai instrumen pengamanan, tetapi juga sebagai kebijakan pemulihan sosial berbasis komunitas. Namun, efektivitas kebijakan tersebut perlu diuji secara empiris, terutama dalam hal kesesuaian desain intervensi dengan karakter masalah di lapangan, kualitas kolaborasi antar lembaga, dan kemampuan instrumen kebijakan menjawab akar konflik yang bersifat multi level.

Data lapangan menunjukkan bahwa dinamika konflik Manggarai berbeda antarwilayah. Rukun Warga (RW), RW 02 relatif kondusif karena penguatan komunikasi antar-Rukun Tetangga (RT), RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kanwil , dan kanal koordinasi informal yang memungkinkan klarifikasi cepat terhadap provokasi. Sebaliknya, RW 03 menunjukkan pola tawuran berulang yang ditandai penggunaan petasan sebagai kode dimulainya konflik, disertai persoalan pengangguran, putus sekolah, dan ketiadaan aktivitas produktif bagi pemuda. RW 04 memperlihatkan kuatnya pengaruh media sosial, provokasi eksternal, masalah keluarga, dan keterlibatan pemuda dalam konflik, bahkan keterangan lapangan menyebut konflik lebih banyak melibatkan kelompok pemuda. RW 05 menonjolkan pengangguran usia produktif, lemahnya fungsi keluarga, kepadatan hunian, pembinaan yang belum berkelanjutan, serta pengawasan yang belum efektif. Sementara itu, RW 012 menunjukkan kompleksitas baru berupa monetisasi kekerasan melalui siaran langsung tawuran, pemberian *gift*, trauma warga, dan kebutuhan pos pantau serta *healing center*.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa konflik sosial di Manggarai merupakan persoalan lintas sektor. Evaluasi internal Kantor Wilayah (Kanwil) Hak Asasi manusia (HAM) DKI Jakarta menegaskan bahwa akar persoalan tidak hanya berkaitan dengan keamanan, tetapi juga ekonomi, kepadatan penduduk, dan pengangguran. Dalam evaluasi tersebut juga disebutkan bahwa kondisi hunian sempit dapat membuat remaja lebih banyak berada di luar rumah dan rentan terpapar pergaulan berisiko. Lebih jauh, pendekatan pelatihan kerja dikritik apabila tidak disertai penyerapan tenaga kerja. Karena itu, arah kebijakan perlu mencakup isu yang lebih struktural, seperti rumah layak huni, verifikasi data sosial, Sekolah Rakyat, bantuan sosial, rehabilitasi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait.

Secara akademik, studi tentang tawuran sering kali menempatkan konflik sebagai masalah perilaku remaja, kriminalitas jalanan, atau lemahnya kontrol sosial. Pendekatan tersebut tetap relevan, tetapi belum cukup untuk menjelaskan konflik sosial perkotaan yang melibatkan faktor struktural, digital, psikososial, dan tata kelola kebijakan. Dalam kasus Manggarai, konflik tidak hanya dipicu oleh tindakan pemuda, tetapi juga oleh kondisi keluarga, kepadatan hunian, pengangguran, putus sekolah, stigma wilayah, provokasi pihak luar, respons keamanan yang belum sepenuhnya preventif, serta munculnya insentif digital melalui konten kekerasan. Oleh karena itu, studi ini memosisikan konflik Manggarai sebagai persoalan kebijakan publik yang membutuhkan pembacaan lintas level dan lintas aktor.

Penelitian ini menggunakan empat kerangka analitis. Pertama, *social-ecological model* digunakan untuk memetakan konflik sebagai fenomena multi level yang melibatkan individu, keluarga, komunitas, institusi, struktur sosial-ekonomi, dan lingkungan digital. Literatur yang digunakan dalam kajian ini menegaskan bahwa model sosial-ekologis memungkinkan analisis terhadap interaksi antar level dalam pembentukan konflik dan penyusunan intervensi (Finigan-Carr et al., 2014; Hong et al., 2015; Wang & Fowler, 2019). Kedua, *conflict transformation* digunakan untuk menilai apakah Kampung Redam mampu mengubah relasi sosial, memulihkan trauma, membangun kepercayaan, dan memperbaiki struktur yang menopang konflik, bukan sekadar menghentikan tawuran jangka pendek (Jennings & González, 2016; Vélez, 2021).

Ketiga, *collaborative governance* digunakan karena penanganan konflik Manggarai melibatkan banyak aktor, mulai dari Kanwil HAM DKI Jakarta, kelurahan, RT/RW, LMK, Karang Taruna, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satpol PP, BNN, Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan Rakyat, hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kerangka ini penting untuk melihat apakah koordinasi lintas sektor hanya bersifat administratif atau benar-benar menghasilkan pembagian peran, kepercayaan, dan tindak lanjut kebijakan yang terukur. Keempat, *policy instrument mix* digunakan untuk menilai kesesuaian kombinasi instrumen kebijakan, seperti keamanan, pendidikan, ekonomi, pemulihan sosial, tata kelola digital, dan perbaikan hunian, dengan karakter masalah di tiap RW. Literatur kebijakan publik menegaskan bahwa masalah kompleks jarang dapat diselesaikan melalui satu instrumen tunggal, sehingga desain kebijakan perlu memperhatikan kombinasi instrumen, aktor pelaksana, dan konteks implementasi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika konflik sosial di Kelurahan Manggarai dan menilai kesesuaian desain Kampung Redam sebagai respons kebijakan publik berbasis komunitas. Secara khusus, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: pertama, bagaimana konfigurasi faktor penyebab konflik sosial Manggarai pada level individu, keluarga, komunitas, institusi, struktur, dan digital; kedua, bagaimana variasi dinamika konflik antar-RW

memengaruhi kebutuhan intervensi kebijakan; dan ketiga, bagaimana Kampung Redam dapat dipahami sebagai kombinasi instrumen kebijakan kolaboratif untuk transformasi konflik sosial perkotaan.

Kontribusi artikel ini terletak pada tiga aspek. Pertama, artikel ini memperluas pembacaan konflik Manggarai dari isu tawuran remaja menjadi masalah kebijakan publik perkotaan yang bersifat multi level. Kedua, artikel ini menggunakan *mixed-method policy analysis* dengan teknik *Framework Analysis* dan *Realist Evaluation* sederhana untuk menghubungkan data survei, wawancara, dokumen monitoring, dan evaluasi kebijakan. Ketiga, artikel ini mengembangkan model analitis Kampung Redam sebagai *policy instrument mix* berbasis komunitas, yang menempatkan keamanan, pemulihan trauma, pemberdayaan ekonomi, pendidikan alternatif, pengendalian konflik digital, dan intervensi struktural sebagai satu kesatuan desain kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan kebijakan penanganan konflik sosial perkotaan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

METODE PENELTIIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *convergent parallel* yang bersifat kualitatif-dominan. Penelitian ini bersifat eksploratori-deskriptif karena diarahkan untuk mengidentifikasi pola, faktor penyebab, dampak, serta kebutuhan intervensi berbasis komunitas. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan fokus pada RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 012. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposif* berdasarkan keterlibatan wilayah tersebut dalam Kampung Redam, riwayat konflik, serta variasi dinamika sosial antar-RW. RW 02 menunjukkan kondisi relatif kondusif melalui penguatan komunikasi warga; RW 03 menonjol pada pola petasan, pengangguran, dan putus sekolah; RW 04 memperlihatkan peran media sosial, provokasi eksternal, dan keterlibatan pemuda; RW 05 menampilkan masalah pengangguran, lemahnya fungsi keluarga, dan pembinaan yang belum optimal; sedangkan RW 012 menunjukkan kompleksitas konflik berbasis media sosial, trauma, dan kebutuhan pemulihan sosial.

Sumber data terdiri atas survei warga, wawancara/dialog komunitas, laporan monitoring, notula rapat, dan dokumen program. Survei "Penyelesaian Perselisihan Antar Kelompok dalam Program Kampung Redam di Kelurahan Manggarai" melibatkan 84 responden dan memuat data profil responden, persepsi penyebab konflik, dampak konflik, peran media sosial, serta penilaian terhadap penyelesaian konflik. Data kualitatif diperoleh dari wawancara warga, pengurus RT/RW, LMK, Karang Taruna, dan unsur keamanan, serta dokumen monitoring di masing-masing RW.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, data survei dianalisis secara deskriptif menggunakan frekuensi dan persentase untuk menggambarkan kecenderungan persepsi responden. Kedua, data wawancara, notula, dan laporan

monitoring dianalisis secara tematik melalui pembacaan berulang, pemberian kode, pengelompokan kode, dan perumusan tema. Kode awal meliputi pengangguran, putus sekolah, kepadatan hunian, pengawasan keluarga, provokasi media sosial, petasan, stigma wilayah, trauma, CCTV, pos pantau, pelatihan kerja, Sekolah Rakyat, dan *healing center*. Ketiga, hasil survei dan temuan tematik diintegrasikan melalui matriks konvergensi untuk melihat kesesuaian, pelengkap, atau perbedaan antar-data.

Kerangka analisis menggunakan *social-ecological* model dan *conflict transformation.* Model sosial-ekologis memetakan konflik pada level individu, keluarga, komunitas, institusi, struktur sosial-ekonomi, dan lingkungan. Perspektif transformasi konflik digunakan untuk membaca Kampung Redam sebagai upaya perubahan relasi sosial, pemulihan trauma, penguatan institusi komunitas, dan pembangunan perdamaian berkelanjutan. Seluruh klaim sensitif diperlakukan sebagai persepsi informan, bukan fakta hukum yang telah terverifikasi.

HASIL PENELITIAN

Strategi Analisis Hasil

Hasil penelitian ini dianalisis melalui *mixed-method policy analysis*, yaitu pembacaan terpadu antara data survei, wawancara warga, notula monitoring, dan dokumen program untuk menjelaskan masalah konflik sebagai persoalan kebijakan publik. Analisis tidak hanya diarahkan untuk menjawab apa penyebab konflik, tetapi juga bagaimana desain kebijakan Kampung Redam merespons variasi masalah di tiap RW.

Secara teknis, hasil dianalisis dengan dua perangkat utama. Pertama, *Framework Analysis* digunakan untuk mengode data berdasarkan empat kerangka teoretis, yaitu *social-ecological model*, *conflict transformation*, *collaborative governance*, dan *policy instrument mix*. Kedua, *Realist Evaluation* sederhana digunakan untuk membaca hubungan antara konteks, mekanisme kebijakan, dan hasil yang diharapkan. Dengan cara ini, analisis tidak berhenti pada deskripsi masalah, tetapi menilai kesesuaian antara karakter konflik, instrumen kebijakan, aktor pelaksana, dan peluang keberhasilan intervensi.

Pemetaan Masalah Berbasis *Framework Analysis*

Framework Analysis menunjukkan bahwa konflik sosial di Kelurahan Manggarai tidak dapat direduksi sebagai kenakalan remaja. Konflik muncul melalui interaksi antara faktor individu, keluarga, komunitas, institusi, struktur sosial-ekonomi, dan ruang digital.

Tabel 1. Pemetaan Masalah Berbasis *Framework* Analisis

Kerangka teori	Dimensi analisis	Indikator empiris	Temuan utama	Implikasi kebijakan
Social Ecological Model	Individu	putus sekolah, pengangguran, waktu luang, perilaku berisiko	Pemuda yang tidak sekolah dan tidak bekerja lebih rentan	Sekolah Rakyat, pelatihan vokasional, konseling,

			terlibat dalam kelompok konflik.	pembinaan karakter.
Social-Ecological Model	Keluarga	pengawasan orang tua, kepadatan hunian, kualitas interaksi keluarga	Hunian padat dan lemahnya pengawasan membuat anak lebih banyak berada di luar rumah.	Program parenting, konseling keluarga, pendataan hunian layak.
Social-Ecological Model	Komunitas	stigma wilayah, solidaritas kelompok, serangan balasan, titik rawan	Kekerasan sering dibenarkan sebagai pembelaan wilayah atau respons terhadap serangan.	Dialog warga, mediasi lintas RW, kegiatan pemuda, penguatan tokoh lokal.
Social-Ecological Model	Institusi	aparat, CCTV, pos pantau, kelurahan, LMK, FKDM	Respons institusional belum sepenuhnya preventif dan masih memerlukan koordinasi lintas sektor.	Gugus tugas lintas sektor, SOP respons cepat, sistem deteksi dini.
Social-Ecological Model	Digital	media sosial, *live streaming, gift*, konten kekerasan	Konflik mengalami perluasan ke ruang digital dan sebagian memperoleh insentif ekonomi.	Patroli siber, literasi digital, kontra-konten, pelaporan akun provokatif.
Conflict Transformation	Pemulihan relasi	dialog warga, trauma *healing, healing center*, kepercayaan sosial	Konflik meninggalkan trauma dan stigma, sehingga penanganan keamanan saja tidak cukup.	Pemulihan psikososial, rekonsiliasi komunitas, pembangunan kepercayaan.
Collaborative Governance	Tata kelola aktor	Kanwil HAM, kelurahan, RT/RW, LMK, Karang Taruna, aparat, BNN, Kemensos	Penanganan konflik membutuhkan koordinasi banyak aktor dengan mandat berbeda.	Forum kolaboratif, pembagian peran, agenda tindak lanjut, evaluasi bersama.
Policy Instrument Mix	Instrumen kebijakan	keamanan, pendidikan, ekonomi, sosial, digital, hunian	Masalah konflik memerlukan kombinasi instrumen, bukan satu bentuk intervensi tunggal.	Paket kebijakan terpadu berbasis karakter masalah tiap RW.

Sumber: Olahan Data 2026

Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa akar konflik bekerja pada beberapa lapisan. Pada tingkat individu, data RW 03 menunjukkan bahwa tawuran berkaitan dengan pengangguran, putus sekolah, dan ketiadaan aktivitas produktif. Tawuran bahkan memiliki pola khas berupa penggunaan petasan sebagai tanda dimulainya konflik. Pada tingkat keluarga, data RW 04 dan RW 05 menunjukkan bahwa kepadatan hunian, keterbatasan pengawasan orang tua, dan lemahnya fungsi keluarga berkontribusi pada meningkatnya waktu anak di luar rumah. Pada tingkat digital, RW 012 memperlihatkan bentuk konflik yang lebih kompleks karena tawuran disiarkan secara langsung melalui media sosial untuk

memperoleh perhatian, dukungan, atau *gift*.

Variasi Dinamika Konflik Antar-RW

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap RW memiliki konfigurasi masalah yang berbeda. Perbedaan ini penting dalam kajian kebijakan publik karena kebijakan yang seragam cenderung gagal menjawab kebutuhan lokal. Kampung Redam, karena itu, perlu dipahami sebagai kebijakan berbasis konteks.

Tabel 2. Dinamika Konflik

Wilayah	Karakter konflik	Faktor dominan	Kapasitas lokal	Kebutuhan kebijakan
RW 02	Relatif kondusif; konflik besar telah menurun	Provokasi luar dan riwayat konflik lama	Komunikasi RT/RW/LMK, Karang Taruna, Kampung Quran	Replikasi model komunikasi warga dan deteksi dini.
RW 03	Tawuran berulang dengan kode petasan	Pengangguran, putus sekolah, kurang aktivitas produktif	Aspirasi warga terhadap pelatihan dan pendidikan alternatif	Sekolah Rakyat, akses kerja, pelatihan berbasis penempatan.
RW 04	Konflik pemuda dan titik rawan RT 13/RT 16	Media sosial, provokasi luar, keluarga, ekonomi	Pembinaan remaja, bantuan modal terbatas	CCTV, patroli terstruktur, ruang aman, pembinaan pemuda.
RW 05	Konflik laten dan pembinaan belum berkelanjutan	Pengangguran, keluarga, hunian padat, lemahnya pengawasan	Aspirasi terhadap pekerjaan dan pelatihan lanjutan	Program keluarga, kerja sama Disnaker/BUMD, evaluasi CCTV.
RW 012	Konflik fisik-digital dan trauma warga	*Live streaming, gift,* serangan balasan, stigma	Pos Dakocan, Karang Taruna, usulan *healing center*	Pos pantau permanen, patroli siber, *trauma healing*, kontra-konten.

Sumber: Olahan Data 2026

RW 02 menjadi kasus pembanding karena relatif berhasil menjaga kondusivitas melalui komunikasi cepat antara RT, RW, LMK, dan kanal informal antarwilayah. Dokumen monitoring mencatat bahwa potensi konflik dapat dicegah melalui klarifikasi cepat dan koordinasi lintas pengurus wilayah. Sebaliknya, RW 03, RW 04, RW 05, dan RW 012 menunjukkan bahwa konflik masih dipengaruhi oleh tekanan struktural, pengaruh digital, serta kelemahan instrumen pencegahan dan pemulihan.

Analisis *Realist Evaluation* Sederhana

Realist Evaluation digunakan untuk menjawab pertanyaan kebijakan: intervensi apa bekerja, untuk siapa, dalam konteks apa, melalui mekanisme apa, dan dengan hasil apa. Analisis ini penting karena satu instrumen kebijakan tidak selalu bekerja sama pada semua wilayah.

Tabel 3. *Realist Evaluation* Sederhana

Konteks	Mekanisme kebijakan	Hasil yang diharapkan	Catatan kritis
RW 02 relatif kondusif karena koordinasi sosial kuat	Penguatan RT/RW/LMK, grup komunikasi, Karang Taruna, kegiatan religius	Deteksi dini provokasi dan pencegahan konflik lebih cepat	Model RW 02 dapat direplikasi, tetapi perlu dukungan anggaran dan keberlanjutan.
RW 03 menghadapi pengangguran, putus sekolah, dan konflik dengan kode petasan	Sekolah Rakyat, pelatihan vokasional, kegiatan pemuda, akses kerja	Pemuda memiliki aktivitas produktif dan orientasi masa depan	Pelatihan tanpa penyerapan kerja berisiko menjadi kegiatan seremonial.
RW 04 memiliki titik rawan, provokasi eksternal, dan keterlibatan pemuda tinggi	CCTV, patroli terstruktur, ruang terbuka, pendidikan karakter, pembinaan pemuda	Titik kumpul konflik berkurang dan kontrol sosial meningkat	Keamanan fisik harus disertai intervensi keluarga dan digital.
RW 05 memiliki pengangguran tinggi dan pembinaan keluarga yang belum optimal	Parenting, PIKK, pelatihan kerja berkelanjutan, kerja sama Disnaker/BUMD	Fungsi keluarga dan akses ekonomi membaik	Membutuhkan pendampingan rutin, bukan kegiatan satu kali.
RW 012 mengalami konflik fisik-digital dan trauma warga	Pos Dakocan permanen, penjagaan 24 jam, patroli siber, *healing center*, kontra-konten	Eskalasi konflik berkurang, trauma tertangani, insentif konten kekerasan menurun	Membutuhkan kerja sama aparat, psikolog, Karang Taruna, dan platform digital.

Sumber : Olahan data 2026

Analisis CMO tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Kampung Redam sangat bergantung pada kesesuaian antara konteks lokal dan mekanisme kebijakan. Pos pantau, misalnya, relevan untuk RW 012 karena terdapat titik konflik fisik yang jelas dan kebutuhan penjagaan 24 jam. Namun, instrumen yang sama tidak cukup untuk RW 03 atau RW 05 jika akar masalah utamanya adalah pengangguran, putus sekolah, dan lemahnya pembinaan keluarga. Dengan demikian, Kampung Redam memerlukan desain kebijakan adaptif, bukan paket intervensi tunggal.

Kampung Redam sebagai Respons Kebijakan Publik

Berdasarkan temuan lapangan, Kampung Redam dapat dipahami sebagai respons kebijakan publik yang memiliki tiga fungsi utama: fungsi diagnostik, fungsi mediasi-komunitas, dan fungsi intervensi awal.

Pertama, fungsi diagnostik terlihat dari kegiatan Ruang Temu Warga dan monitoring per RW yang digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah berbasis pengalaman warga. Kedua, fungsi mediasi-komunitas tampak dalam dialog antara warga, pengurus wilayah, aparat, dan Kanwil HAM. Ketiga, fungsi intervensi awal terlihat dari usulan pos pantau, CCTV, Sekolah Rakyat, pelatihan kerja,

trauma healing, *healing center,* dan koordinasi lintas sektor.

Tabel 5. Respon Kebijakan Publik

Instrumen kebijakan	Bentuk temuan lapangan	Fungsi kebijakan	Catatan kritis
Keamanan	Pos Pantau Dakocan, CCTV, patroli, penjagaan 24 jam	Mencegah eskalasi cepat dan memutus titik kumpul konflik	Efektif jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan akar sosial-ekonomi.
Pendidikan	Sekolah Rakyat, pendidikan karakter, kegiatan keagamaan	Mengembalikan struktur harian dan orientasi masa depan pemuda	Perlu target peserta, kurikulum, dan mekanisme keberlanjutan.
Ekonomi	Pelatihan kerja, UMKM, akses pekerjaan, bantuan modal	Mengalihkan energi pemuda ke aktivitas produktif	Pelatihan tanpa penyerapan kerja berisiko tidak berdampak.
Pemulihan sosial	*Healing center*, konseling psikologis, *trauma healing*	Mengatasi trauma dan mencegah dendam kolektif	Membutuhkan psikolog, jadwal layanan, dan indikator pemulihan.
Digital	Patroli siber, kontra-konten, kreator konten positif	Memutus monetisasi kekerasan dan provokasi daring	Perlu kerja sama platform, aparat, FKDM, dan Karang Taruna.
Struktural	Rumah layak huni, verifikasi data sosial, PKH/BPNT, rehabilitasi	Menyentuh akar ketimpangan dan kerentanan sosial	Membutuhkan koordinasi lintas sektor dan data kependudukan akurat.

Sumber : Olahan Data 2026

Notula evaluasi Kanwil memperkuat kebutuhan desain kebijakan terpadu. Dalam evaluasi tersebut, pelatihan kerja dinilai masih konvensional apabila tidak diikuti penyerapan tenaga kerja. Arahan kebijakan kemudian bergeser ke isu yang lebih struktural, seperti pendataan calon penerima rumah subsidi secara *door-to-door*, koordinasi dengan Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Sosial, BNN Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, Kampung Redam lebih tepat diposisikan sebagai *policy instrument mix*, yaitu kombinasi instrumen keamanan, pendidikan, ekonomi, sosial, digital, dan struktural.

Tata Kelola Kolaboratif dalam Implementasi Kampung Redam

Kerangka *collaborative governance* penting karena konflik Manggarai tidak dapat ditangani oleh satu aktor. Data menunjukkan keterlibatan Kanwil HAM, kelurahan, RT/RW, LMK, Karang Taruna, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satpol PP, Kesbangpol, BNN, Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan Rakyat, serta pemerintah daerah.

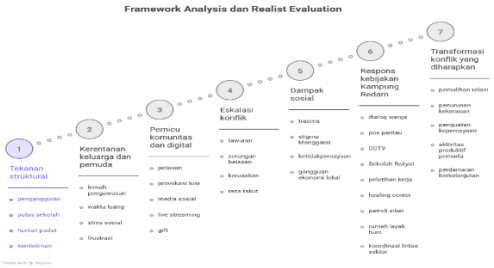
Tabel 6. Tata Kelola Kolaboratif Kampung Redam

Unsur tata kelola kolaboratif	Temuan empiris	Kekuatan	Risiko implementasi
Aktor lintas sektor	Kanwil HAM, kelurahan, RT/RW, LMK, aparat, OPD, kementerian/lembaga	Basis kolaborasi luas	Risiko koordinasi lambat dan tumpang tindih mandat.
Forum koordinasi	Ruang Temu Warga, monitoring RW, rapat evaluasi Kanwil	Ada ruang dialog formal dan informal	Perlu agenda tindak lanjut yang terukur.
Kepercayaan warga	Warga menyampaikan aspirasi dan pengalaman konflik	Data lapangan kaya dan kontekstual	Klaim sensitif perlu diverifikasi agar tidak menjadi stigma.
Pembagian peran	Usulan pelibatan BNN, Kemensos, Pemprov, Disnaker, aparat	Memungkinkan intervensi lintas sektor	Tanpa PIC dan indikator, program berisiko berhenti di rekomendasi.
Keberlanjutan	Usulan pos permanen, *healing center*, Sekolah Rakyat, rumah layak huni	Mengarah pada transformasi konflik	Membutuhkan anggaran, regulasi, dan monitoring periodik.

Sumber : Olahan Data 2026

Temuan ini menunjukkan bahwa Kampung Redam telah memiliki modal kolaboratif, tetapi belum cukup apabila hanya bertumpu pada forum dialog. Kebutuhan utama berikutnya adalah pelembagaan koordinasi melalui gugus tugas, indikator kinerja, pembagian peran, dan mekanisme evaluasi. Tanpa hal tersebut, kolaborasi berisiko menjadi koordinasi administratif, bukan tata kelola kebijakan yang menghasilkan perubahan nyata.

Sintesis Model Temuan



Gambar 1. Framework Analisis dan Realist Evaluation
(Sumber: Olahan Data 2026)

Model tersebut menegaskan bahwa konflik sosial di Manggarai merupakan hasil pertemuan antara kerentanan struktural, lemahnya kontrol sosial keluarga, solidaritas kelompok pemuda, provokasi digital, dan keterbatasan respons institusional. Oleh sebab itu, efektivitas Kampung Redam tidak dapat hanya diukur dari berkurangnya tawuran dalam jangka pendek. Ukuran keberhasilannya harus mencakup peningkatan koordinasi lintas sektor, keberlanjutan pemulihan trauma, tersedianya aktivitas produktif bagi pemuda, perbaikan akses pendidikan dan kerja, penguatan tata kelola digital, serta pembenahan kondisi hunian dan perlindungan sosial.

PEMBAHASAN

Penggunaan *mixed-method policy analysis* dalam penelitian ini memungkinkan integrasi antara data kuantitatif dan kualitatif secara paralel pada tahap interpretasi guna memperkuat validitas temuan serta kedalaman analisis kebijakan (Adhikari & Timsina, 2024). Pendekatan ini sejalan dengan desain *convergent mixed methods* yang menempatkan data survei dan wawancara sebagai kekuatan untuk menjelaskan kompleksitas kebijakan publik melalui strategi integrasi data yang rigid (Schlunegger et al., 2024). Temuan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa konflik sosial di Manggarai merupakan fenomena *multi level* yang mencakup dimensi individu hingga digital. Hal ini konsisten dengan prinsip desain penelitian sekuensial yang mampu membedah fenomena sosial kompleks secara mendalam (González-Díaz & Cabrera, 2021).

Variasi konfigurasi masalah yang ditemukan pada Tabel 2 menegaskan bahwa kebijakan publik yang bersifat seragam (one size fits all) cenderung gagal menjawab kebutuhan lokal, sehingga diperlukan integrasi data yang ketat untuk mencapai rigoritas metodologis dalam riset (Agustian, 2024). Keberhasilan relatif di RW 02 dibandingkan wilayah lain menunjukkan pentingnya kapasitas lokal dalam merespons faktor dominan di masing-masing wilayah melalui kerangka berpikir tematik yang tepat (Braun & Clarke, 2022). Berdasarkan analisis *Realist Evaluation* pada Tabel 3 dan respons kebijakan pada Tabel 5, efektivitas Kampung Redam sangat bergantung pada kesesuaian antara konteks lokal dan mekanisme kebijakan melalui panduan praktis integrasi data metode campuran (Lorenzini et al., 2024).

Analisis pada tabel 6 mengonfirmasi bahwa penanganan konflik di Manggarai membutuhkan *Collaborative Governance* karena melibatkan aktor lintas sektor dengan mandat yang berbeda. Sesuai dengan teori tata kelola kolaboratif, keberhasilan transisi Kampung Redam menjadi kebijakan nyata sangat ditentukan oleh kualitas forum koordinasi, pembagian peran yang jelas, serta pembangunan kepercayaan (trust building) antar aktor guna mencapai keabsahan hasil penelitian (Soares & Filho, 2021). Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa Kampung Redam berpotensi menjadi model kebijakan adaptif apabila ditopang oleh koordinasi lintas sektor dan komitmen implementasi yang berkelanjutan, serta didukung oleh strategi generalisasi temuan riset yang logis untuk memperkuat dampak kebijakan (Younas & Durante, 2023).

SIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa konflik sosial di Kelurahan Manggarai tidak dapat dipahami semata sebagai tawuran remaja atau gangguan keamanan lokal. Konflik tersebut merupakan fenomena kebijakan publik yang terbentuk melalui interaksi antara tekanan struktural, kerentanan keluarga, dinamika komunitas, respons institusional, serta eskalasi konflik di ruang digital. Temuan utama memperlihatkan bahwa setiap RW memiliki konfigurasi masalah yang berbeda: RW 02 relatif kondusif karena kuatnya koordinasi warga; RW 03 menonjol pada pengangguran dan putus

sekolah; RW 04 pada provokasi eksternal, media sosial, dan keterlibatan pemuda; RW 05 pada lemahnya fungsi keluarga dan pembinaan berkelanjutan; sedangkan RW 012 menunjukkan transformasi konflik menuju monetisasi kekerasan digital dan kebutuhan pemulihan trauma.

Implikasi utama dari temuan ini adalah bahwa Kampung Redam perlu dirancang sebagai kebijakan adaptif berbasis konteks, bukan paket intervensi seragam. Instrumen keamanan seperti CCTV, patroli, dan pos pantau tetap penting, tetapi harus dikombinasikan dengan pendidikan alternatif, pelatihan berbasis penyerapan kerja, pemulihan psikososial, literasi digital, rumah layak huni, serta tata kelola kolaboratif lintas sektor.

Kontribusi studi ini terletak pada perluasan pembacaan konflik urban dari isu perilaku remaja menjadi persoalan desain kebijakan publik multi level. Dengan menggabungkan *social-ecological model*, *conflict transformation*, *collaborative governance*, dan *policy instrument mix*, studi ini menawarkan kerangka analitis untuk menilai kesesuaian antara akar konflik dan respons kebijakan. Penelitian lanjutan dapat menguji efektivitas implementasi Kampung Redam melalui evaluasi longitudinal, terutama terhadap perubahan perilaku pemuda, pemulihan trauma warga, dan keberlanjutan koordinasi lintas sektor.

DAFTAR PUSTAKA

Adhikari, R., & Timsina, T. P. (2024). An educational study focused on the application of mixed method approach as a research method. *OCEM Journal of Management, Technology & Social Sciences, 3*(1), 94–109. https://doi.org/10.3126/ocemjmtss.v3i1.62229

Agustian, H. Y. (2024). Methodological rigor in laboratory education research. *Laboratories, 1*(1), 74–86. https://doi.org/10.3390/laboratories1010006

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Béland, D., Howlett, M., & Mukherjee, I. (2017). Instrument constituencies and public policy-making: An introduction. *Policy and Society, 37*(1), 1–13. https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1375249

Braun, V., & Clarke, V. (2022). Conceptual and design thinking for thematic analysis. *Qualitative Psychology, 9*(1), 3–26. https://doi.org/10.1037/qup0000196

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.

Buchholtz, N. (2019). Planning and conducting mixed methods studies in mathematics educational research. In *Compendium for early career researchers in mathematics education* (pp. 131–152). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15636-7_6

Campbell, R., Goodman-Williams, R., Feeney, H., & Fehler-Cabral, G. (2018). Assessing triangulation across methodologies, methods, and stakeholder groups: The joys, woes, and politics of interpreting convergent and divergent data. *American Journal of Evaluation, 41*(1), 125–144. https://doi.org/10.1177/1098214018804195

Dewasiri, N. J., Weerakoon, Y. K. B., & Azeez, A. A. (2018). Mixed methods in finance research. *International Journal of Qualitative Methods, 17*(1). https://doi.org/10.1177/1609406918801730

Edwards, D. J., & Holt, G. D. (2010). The case for "3D triangulation" when applied to construction management research. *Construction Innovation, 10*(1), 25–41. https://doi.org/10.1108/14714171011018292

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory, 22*(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Farquhar, J. D., Michels, N., & Robson, J. (2020). Triangulation in industrial qualitative case study research: Widening the scope. *Industrial Marketing Management, 87*, 160–170. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.02.001

Gammon, A. R., Zhu, Q., Streiner, S., Clancy, R. F., & Thorpe, R. (2022). Developing conceptual and methodological foundations for a cross-cultural, multi-institutional study of ethical reasoning and moral dispositions of engineering students. *2022 IEEE Frontiers in Education Conference*, 1–7. https://doi.org/10.1109/fie56618.2022.9962559

Ganassali, S. (2016). Presenting online multi-image elicitation: The contributions of a hybrid protocol. *Recherche et Applications en Marketing (English Edition), 31*(4), 65–82. https://doi.org/10.1177/2051570716658464

Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. *The Qualitative Report, 8*(4), 597–607. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2003.1870

González-Díaz, R. R., & Cabrera, G. I. B. (2021). Predictive sequential research design to study complex social phenomena. *Entropy, 23*(5), 627. https://doi.org/10.3390/e23050627

Grafton, J., Lillis, A. M., & Mahama, H. (2011). Mixed methods research in accounting. *Qualitative Research in Accounting & Management, 8*(1), 5–21. https://doi.org/10.1108/11766091111124676

Guetterman, T. C., Babchuk, W. A., Smith, M. H., & Stevens, J. (2017). Contemporary approaches to mixed methods-grounded theory research: A field-based analysis. *Journal of*

Mixed Methods Research, 13(2), 179–195. https://doi.org/10.1177/1558689817710877

Han, H., Youm, J., Tucker, C., Teal, C. R., Rougas, S., Park, Y. S., Mooney, C. J., Hanson, J. L., & Berry, A. (2022). Research methodologies in health professions education publications: Breadth and rigor. *Academic Medicine, 97*(11S), S54–S62. https://doi.org/10.1097/acm.0000000000004911

Hong, Q. N., Rees, R., Sutcliffe, K., & Thomas, J. (2020). Variations of mixed methods reviews approaches: A case study. *Research Synthesis Methods, 11*(6), 795–811. https://doi.org/10.1002/jrsm.1437

Kinnebrew, E., Shoffner, E., Farah-Pérez, A., Mills-Novoa, M., & Siegel, K. (2020). Approaches to interdisciplinary mixed methods research in land-change science and environmental management. *Conservation Biology, 35*(1), 130–141. https://doi.org/10.1111/cobi.13642

Lederach, J. P. (1997). *Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies*. United *States* Institute of Peace Press.

Lorenzini, E., Galeano, S. P. O., Schmidt, C. R., & Cañón-Montañez, W. (2024). Practical guide to achieve rigor and data integration in mixed methods research. *Investigación y Educación en Enfermería, 42*(3). https://doi.org/10.17533/udea.iee.v42n3e02

McKinley, K. M. (2019). Assessing mixed methods research quality in the European student mobility literature. *Research in Comparative and International Education, 14*(4), 433–449. https://doi.org/10.1177/1745499919889216

Ozawa, S., & Pongpirul, K. (2013). 10 best resources on mixed methods research in health systems. *Health Policy and Planning, 29*(3), 323–327. https://doi.org/10.1093/heapol/czt019

Palinkas, L. A., & Zatzick, D. (2018). Rapid assessment procedure informed clinical ethnography in pragmatic clinical trials of mental health services implementation: Methods and applied case study. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 46*(2), 255–270. https://doi.org/10.1007/s10488-018-0909-3

Reid, C., Keighrey, C., Murray, N., Dunbar, R., & Buckley, J. (2020). A novel mixed methods approach to synthesize EDA data with behavioral data to gain educational insight. *Sensors, 20*(23), 6857. https://doi.org/10.3390/s20236857

Roest, J.-W. van der, Spaaij, R., & Bottenburg, M. van. (2013). Mixed methods in emerging academic subdisciplines. *Journal of Mixed Methods Research, 9*(1), 70–90.

https://doi.org/10.1177/1558689813508225

Schlunegger, M. C., Shaha, M., & Palm, R. (2024). Methodologic and data-analysis triangulation in case studies: A scoping review. *Western Journal of Nursing Research, 46*(8), 611–622. https://doi.org/10.1177/01939459241263011

Shin, S., & Carpenter, S. (2022). A review of the participant observation method in journalism: Designing and reporting. *Review of Communication Research, 10*. https://doi.org/10.12840/issn.2255-4165.035

Silan, M. A. A. (2023). *Rethinking multi-site studies: Can the cross-indigenous approach remedy common cross-cultural vulnerabilities?* https://doi.org/10.31234/osf.io/jsyca

Soares, R. F., & Filho, E. R. G. (2021). Anti-corruption enforcement and organizations: A narrative review. *Revista de Administração Contemporânea, 25*(6). https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021190149.en

Solano, M. A. (2020). Triangulation and trustworthiness: Advancing research on public service interpreting through qualitative case study methodologies. *FITISPos International Journal, 7*(1), 31–52. https://doi.org/10.37536/fitispos-ij.2020.7.1.249

Younas, A., & Durante, Á. (2023). The logics of and strategies to enhance generalization of mixed methods research findings. *Methodology, 19*(2), 170–191. https://doi.org/10.5964/meth.10863